

## **AGENCY THEORY DALAM PERSPEKTIF ISLAM**

Oleh : Mariska Dewi Anggraeni  
Jurusan Syariah STAIN Pekalongan

**Abstract :** Since agency theory was founded in 1970 by accountancy experts in the United States, the reliability of accountancy role as information media for people outside company was questioned. Agency theory explaining risk problem between principals and agents resulted from cooperation between principals and agents frequently discusses the role of accounting information as relating media between both sides. The insight discrepancy between principals and agents and the information difference of agents make agents often report invalid asymmetric information to earn expected advantages. This moral hazard urges the principals to implement controlling system to watch management behaviors as amanah holders.

**Key Words :** *Agency theory*, Informasi Asimetris, Perilaku Amanah

### **A. Pendahuluan**

*Agency theory* terfokus pada dua individu pihak yaitu prinsipal dan agen. Prinsipal didefinisikan sebagai pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yang disebut agen, untuk dapat bertindak atas nama agen tersebut. Agen, sebagai pihak yang diberi amanah untuk menjalankan dana dari pihak pemilik (prinsipal) harus mempertanggungjawabkan apa yang telah di amanahkan. Di lain pihak prinsipal sebagai pihak pemberi amanah akan memberikan insentif kepada agen berbagai macam fasilitas baik finansial maupun nonfinansial. Permasalahan timbul ketika kedua belah pihak mempunyai persepsi dan sikap yang berbeda dalam hal pemberian informasi yang akan digunakan oleh prinsipal untuk memberikan insentif kepada agen.

*Agency theory* berasal dari asumsi bahwa individu memaksimalkan tingkat kepuasan yang diharapkan melalui kemampuan sumber dayanya yang memadai dan inovasinya dalam bertindak sehingga pengungkapan yang dikeluarkan berdasarkan acuan pada *agency theory* merupakan sebagian dari manfaat yang diharapkan oleh individu dengan suatu tindakan tertentu. *Agency theory* memberikan peranan penting akuntansi dalam menyediakan informasi setelah suatu kejadian atau keputusan, yang mana seorang agen melaporkan kepada prinsipal tentang kejadian-kejadian yang muncul dalam periode yang telah lalu. *Agency theory* mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan kemampuan individu (baik prinsipal maupun agen) dalam mengevaluasi lingkungan dimana suatu keputusan harus diambil (*The Belief Revision Role*).
2. Untuk mengevaluasi hasil dari keputusan yang telah diambil untuk memudahkan pengalokasian hasil antara prinsipal dan agen sesuai dengan persetujuan dalam kontrak kerja (*The Performance Evaluation Role*).

Agen mempunyai informasi tentang operasi dan kinerja perusahaan secara riil dan menyeluruh, tidak akan memberikan seluruh informasi itu untuk prinsipal. Sebaliknya prinsipal yang memerlukan informasi atas kepemilikannya, memiliki akses pada informasi internal perusahaan yang terbatas. Keadaan ini tidak terlepas dari asumsi lain dalam *agency theory* yaitu adanya pertentangan antara prinsipal dan agen.

Pertentangan ini akan semakin lebih nyata apabila agen melakukan upaya yang sistematis dalam membatasi gerak dari prinsipal, dengan semakin menjauh dari prinsip transparansi informasi. Adanya keadaan ini secara tidak langsung akan menimbulkan biaya pengamatan bagi prinsipal yang dapat berupa :

1. Pengeluaran atas pengamatan yang menyita perhatian prinsipal,
2. Pengeluaran atas adanya perikatan kontrak dengan agen, dan
3. Sisa kerugian.

Mengingat pertentangan yang semakin tajam justru akan menyebabkan konflik disfungsional yang berkepanjangan. Menurut Scapen (1987) bahwa masing-masing pihak akan berusaha sekeras mungkin untuk dapat memaksimalkan utilitas. Di samping itu, utilitas tersebut akan menghadapi kendala (*constraints*), sehingga baik prinsipal tidak akan mencapai tingkat utilitas maksimum seperti yang diharapkan, sehingga yang akan terjadi adalah suatu keadaan yang disebut pareto optimal. Pareto optimal adalah suatu situasi yang terjadi apabila aktivitas realokasi produksi atau konsumsi tidak memungkinkan semua pihak menjadi lebih baik tanpa membuat suatu pihak menjadi lebih lemah. Dengan tercapainya pareto optimal, maka optimalisasi utilitas tidak hanya dilihat dari satu pihak saja, namun dari berbagai pihak.

Dalam *agency theory* dikenal adanya kontrak kerja, yang akan mengatur proporsi utilitas masing-masing pihak dengan tetap memperhitungkan kemanfaatan secara keseluruhan. Kontrak kerja adalah seperangkat aturan yang mengatur mengenai mekanisme bagi hasil, baik yang berupa keuntungan (*return*) maupun risiko (*risk*) yang disetujui oleh prinsipal dan agen. Selain itu, kontrak kerja yang optimal adalah kontrak yang seimbang antara prinsipal dan agen yang secara sistematis memperlihatkan pelaksanaan kewajiban yang optimal oleh agen dan pemberian imbalan khusus oleh prinsipal kepada agen. Kajian mengenai bagaimana membuat suatu kontrak kerja yang optimal merupakan kunci bagi terwujudnya suatu hubungan prinsipal-agen yang ideal.

## **B. Agency Theory**

*Agency theory* mengimplikasikan adanya informasi asimetris antara manajer sebagai agen dan pemilik (dalam hal ini adalah pemegang saham) sebagai prinsipal. Informasi asimetris muncul ketika manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan dimasa mendatang dibandingkan pemegang saham dan *stakeholder* lainnya. Oleh karena itu prinsipal perlu menciptakan suatu sistem yang dapat memonitor perilaku agen supaya bertindak sesuai dengan harapannya. Aktivitas ini meliputi biaya untuk penciptaan standar, biaya monitoring agen, penciptaan sistem informasi akuntansi dan lain-lain. Aktivitas ini menimbulkan biaya yang disebut sebagai *agency cost*.

Hubungan antara prinsipal dan agen dikatakan berhasil apabila *agency cost* minimal, ada keseimbangan dalam memaksimalkan utilitas antara agen dan prinsipal, atau mencapai *pareto optimum* dan ada pihak independen dalam hal ini auditor internal atau eksternal yang mampu mengendalikan harmonisasi hubungan prinsipal dan agen. Kondisi ideal ini sangat sulit dicapai karena yang memegang peranan dalam pengolahan dan akses informasi adalah agen sehingga menimbulkan informasi asimetris, dimana agen lebih tahu banyak dibandingkan prinsipal. Dikaitkan dengan peningkatan nilai perusahaan, ketika terdapat informasi asimetris, manajer dapat memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada investor guna memaksimalkan nilai saham perusahaan. Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan (*disclosure*) informasi akuntansi.

Dalam mekanisme pasar modal, pelaku pasar juga menghadapi masalah keagenan. Partisipan pasar saling berinteraksi di pasar modal guna mewujudkan tujuannya, membeli atau menjual sekuritas. Aktivitas yang mereka lakukan utamanya dipengaruhi oleh informasi yang diterima baik secara langsung (laporan publik) maupun tidak langsung (*insider trading*). *Dealer* atau *market-makers* sebagai salah satu partisipan pasar modal memiliki informasi yang terbatas terhadap persepsi masa yang akan datang, dan menghadapi potensi kerugian ketika berhadapan dengan pedagang terinformasi (*informed traders*) karena mereka tidak memiliki informasi *superior* sebagaimana pedagang terinformasi. Timbulnya masalah informasi asimetris ini mendorong *dealer* untuk menutupi kerugian dari pedagang terinformasi dengan meningkatkan *spread*-nya terhadap pedagang likuid. Jadi, dapat dikatakan bahwa informasi asimetris yang terjadi antara *dealer* dan pedagang terinformasi tercermin pada *spread* yang ditentukannya. Model informasi asimetris tersebut juga mengimplikasikan bahwa pengungkapan publik dari peristiwa yang mengubah informasi asimetris seharusnya disertai dengan penurunan *spread dealer*.

*Agency theory* mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Pemegang saham sebagai prinsipal diasumsikan hanya tertarik kepada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan. Sedang para agen diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dengan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut. Karena perbedaan kepentingan ini masing-masing pihak berusaha memperbesar keuntungan bagi diri sendiri. Prinsipal menginginkan pengembalian yang sebesar-besarnya dan secepatnya atas investasi yang salah satunya dicerminkan dengan kenaikan porsi dividen dari tiap saham yang dimiliki. Agen menginginkan kepentingannya diakomodir dengan pemberian kompensasi / bonus / insentif / remunerasi yang “memadai” dan sebesar-besarnya atas kinerjanya. Prinsipal menilai prestasi agen berdasarkan kemampuannya memperbesar laba untuk dialokasikan pada pembagian dividen. Makin tinggi laba, makin tinggi harga saham dan makin besar dividen, maka agen dianggap berhasil / berkinerja baik sehingga layak mendapat insentif yang tinggi.

Sebaliknya agen pun memenuhi tuntutan prinsipal agar mendapatkan kompensasi yang tinggi. Sehingga bila tidak ada pengawasan yang memadai maka sang agen dapat memainkan beberapa kondisi perusahaan agar seolah-olah target tercapai. Permainan tersebut bisa atas prakarsa dari prinsipal ataupun inisiatif agen sendiri. Maka terjadilah *Creative Accounting* yang menyalahi aturan, misal: adanya

piutang yang tidak mungkin tertagih yang tidak dihapuskan; *Capitalisasi expense* yang tidak semestinya; Pengakuan penjualan yang tidak semestinya; yang kesemuanya berdampak pada besarnya nilai aktiva dalam Neraca yang “mempercantik” laporan keuangan walaupun bukan nilai yang sebenarnya. Atau bisa juga dengan melakukan *income smoothing* (membagi keuntungan ke periode lain) agar setiap tahun kelihatan perusahaan meraih keuntungan, padahal kenyataannya merugi atau laba turun.

*Agency theory* menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu: a) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self-interest*), b) manusia memiliki rasional terbatas mengenai persepsi masa datang (*bounded-rationality*), dan c) manusia selalu tak suka risiko (*risk-averse*) (Eisenhardt, 1989). Hubungan keagenan adalah suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (prinsipal) mengikat orang lain (agen) untuk melakukan layanan atas kehendak mereka, dengan mendelegasikan kekuasaan beberapa pengambilan keputusan kepada agen.

Jensen dan Meckling (1976), menyatakan bahwa *agency theory* mendeskripsikan pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Untuk itu manajemen diberikan sebagian kekuasaan untuk membuat keputusan bagi kepentingan terbaik pemegang saham. Oleh karena itu, manajemen wajib mempertanggungjawabkan semua upayanya kepada pemegang saham. Karena unit analisis dalam *agency theory* adalah kontrak yang melandasi hubungan antara prinsipal dan agen, maka fokus dari teori ini adalah pada penentuan kontrak yang paling efisien yang mendasari hubungan antara prinsipal dan agen. Untuk memotivasi agen maka prinsipal merancang suatu kontrak agar dapat mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak keagenan. Kontrak yang efisien adalah kontrak yang memenuhi dua faktor, yaitu :

1. Agen dan prinsipal memiliki informasi yang simetris artinya baik agen maupun majikan memiliki kualitas dan jumlah informasi yang sama sehingga tidak terdapat informasi tersembunyi yang dapat digunakan untuk keuntungan dirinya sendiri
2. Risiko yang dipikul agen berkaitan dengan imbal jasanya adalah kecil yang berarti agen mempunyai kepastian yang tinggi mengenai imbalan yang diterimanya.

Dalam mendefinisikan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (prinsipal) melibatkan orang lain (agen) untuk melakukan beberapa pekerjaan atas nama mereka yang meliputi pendelegasian beberapa kewenangan pengambilan keputusan kepada agen. Jika kedua belah pihak pada hubungan tersebut adalah pemaksimalisasi utilitas maka ada alasan yang baik untuk meyakini bahwa agen tidak akan selalu bertindak demi kepentingan terbaik prinsipal. Prinsipal bisa membatasi penyimpangan dari kepentingannya dengan menetapkan insentif yang sesuai bagi agen dan dengan mengeluarkan biaya pengawasan yang dirancang untuk membatasi aktivitas agen yang menyimpang.

### **C. Informasi Asimetris**

Pertentangan dan tarik menarik kepentingan anatar prinsipal dan agen dapat menimbulkan permasalahan yang dalam *agency theory* dikenal sebagai informasi asimetris yang tidak sepadan atau tidakimbang. Yaitu suatu kondisi yang disebabkan karena adanya distribusi informasi yang tidak sama antara prinsipal dan agen. Seharusnya prinsipal memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam mengukur tingkat hasil yang diperoleh dari usaha agen, namun ternyata ukuran-ukuran keberhasilan yang diperoleh oleh prinsipal tidak seluruhnya transparan sehingga informasi yang diperoleh prinsipal tetap tidak dapat menjelaskan hubungan antara keberhasilan yang telah dicapai dengan usaha yang telah dilakukan agen. Kondisi informasi asimetris ini dapat menimbulkan permasalahan. *Pertama, moral hazard* yaitu bilamana agen tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kontrak kerja. *Kedua, adverse selection* yaitu suatu keadaan dimana prinsipal tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya, atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas.

Apabila agen yang berperan sebagai penyedia informasi bagi prinsipal dalam pengambilan keputusan melakukan upaya sistematis yang dapat membatasi gerak dan menghambat prinsipal dalam pengambilan keputusan strategis melalui penyediaan informasi yang tidak transparan dan di lain pihak kemudian prinsipal selaku pemilik modal bertindak semaunya ataupun sewenang-wenang karena ia merasa sebagai pihak yang paling berkuasa dan penentu keputusan dengan wewenang yang tak terbatas maka kemudian yang terjadi adalah pertentangan yang semakin tajam yang justru akan menyebabkan konflik disfungsional yang berkepanjangan yang pada akhirnya akan merugikan semua pihak.

Informasi akuntansi yang berkualitas berguna bagi investor untuk menurunkan informasi asimetris. Informasi asimetris timbul ketika manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa depan dibandingkan pemegang saham dan *stakeholder* lainnya. Pengungkapan informasi yang tinggi akan meningkatkan nilai perusahaan dan mengurangi informasi asimetris. Ketika timbul informasi asimetris, keputusan pengungkapan yang dibuat oleh manajer dapat mempengaruhi harga saham sebab informasi asimetris antara investor yang lebih terinformasi dan investor kurang terinformasi menimbulkan biaya transaksi dan mengurangi likuiditas yang diharapkan dalam pasar untuk saham-saham perusahaan (Komalasari, 2001). Lang dan Lundholm (1996) mengemukakan bahwa keuntungan potensial terhadap pengungkapan, termasuk meningkatnya investor yang mengikutinya, mengurangi estimasi risiko dan mengurangi informasi asimetris.

Pada kenyataannya informasi simetris itu tidak pernah terjadi, karena manajer, sebagai pihak dalam, mempunyai akses yang lebih baik terhadap informasi mengenai keadaan perusahaan dibandingkan investor yang merupakan pihak luar. Manajer berdasarkan pengetahuannya mengenai keadaan perusahaan mempunyai keyakinan tertentu mengenai prospek perusahaan di masa depan. Untuk menyampaikan pandangannya kepada pasar, manajer dapat menggunakan sinyal, antara lain dividen, pemecahan saham (*stock split*), pembelian kembali saham (*stock repurchase*), penerbitan hak beli (*right issue*), dan pengungkapan. sedangkan prinsipal sangat jarang atau bahkan tidak pernah datang ke perusahaan sehingga informasi yang diperoleh sangat

sedikit. Hal ini menyebabkan kontrak efisien tidak pernah terlaksana sehingga hubungan agen dan prinsipal selalu dilandasi oleh informasi asimetris. Agen sebagai pengendali perusahaan pasti memiliki informasi yang lebih baik dan lebih banyak dibandingkan dengan prinsipal. Di samping itu, karena verifikasi sangat sulit dilakukan, maka tindakan agen pun sangat sulit untuk diamati. Dengan demikian, membuka peluang agen untuk memaksimalkan kepentingannya sendiri dengan melakukan tindakan yang tidak semestinya atau sering disebut *dysfunctional behaviour*, dimana tindakan ini dapat merugikan prinsipal, baik memanfaatkan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi, maupun perekayasaan kinerja perusahaan.

Dalam mendefinisikan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (prinsipal) melibatkan orang lain (agen) untuk melakukan beberapa pekerjaan atas nama mereka yang meliputi pendelegasian beberapa kewenangan pengambilan keputusan kepada agen. Jika kedua belah pihak pada hubungan tersebut adalah pemaksimalisasi utilitas maka ada alasan yang baik untuk meyakini bahwa agen tidak akan selalu bertindak demi kepentingan terbaik prinsipal. Prinsipal bisa membatasi penyimpangan dari kepentingannya dengan menetapkan insentif yang sesuai bagi agen dan dengan mengeluarkan biaya pengawasan yang dirancang untuk membatasi aktivitas agen yang menyimpang.

Sebagai tambahan pada beberapa situasi mungkin agen yang mengeluarkan sumber daya (biaya pengikat) untuk menjamin bahwa dia tidak akan menyukai tindakan-tindakan tertentu yang akan merugikan prinsipal atau untuk memastikan bahwa prinsipal akan diberi ganti rugi jika agen mengambil tindakan yang demikian. Meskipun demikian, secara umum adalah mustahil bagi prinsipal ataupun agen dengan biaya nol untuk memastikan bahwa agen akan membuat keputusan yang optimal dari sudut pandang prinsipal. Di sebagian besar hubungan keagenan, prinsipal dan agen akan mengeluarkan biaya pengawasan dan ikatan yang positif dan sebagai tambahan akan ada perbedaan antara keputusan agen dengan keputusan-keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan prinsipal.

Masalah keagenan secara mendasar berbeda dari kebanyakan literatur yang ada, dimana memfokuskan secara eksklusif pada aspek-aspek relatif dari hubungan keagenan; yaitu bagaimana untuk menstruktur hubungan kontraktual (termasuk insentif kompensasi) antara prinsipal dan agen untuk membuat pilihan yang akan memaksimalkan kesejahteraan prinsipal berdasarkan ketidakpastian dan adanya pengawasan.

#### **D. *Agency Theory* dalam Perspektif Islam**

Secara normatif, masyarakat muslim mempraktikkan akuntansi berdasarkan pada perintah Allah dalam QS Al-Baqarah [ 2 ] : 282. Perintah ini sesungguhnya bersifat universal dalam arti bahwa praktik pencatatan harus dilakukan dengan benar atas transaksi yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lainnya. “Substansi” dari perintah ini adalah : (1) praktik pencatatan yang harus dilakukan dengan (2) benar (adil dan jujur). Substansi dalam konteks ini, sekali lagi, berlaku umum sepanjang masa, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.

Teori Akuntansi Syariah memberikan *guidance* tentang bagaimana seharusnya Akuntansi Syariah itu dipraktikkan. Dengan bingkai faith (keimanan), teori (knowledge) dan praktik Akuntansi Syariah (action) akan mampu menstimulasi terciptanya realitas ekonomi-bisnis yang bertauhid. Realitas ini adalah realitas yang di dalamnya sarat dengan jaringan kerja kuasa ilahi yang akan menggiring manusia untuk melakukan tindakan ekonomi-bisnis yang sesuai dengan Sunnatullah (Triyuwono, 1986).

Dalam konteks lingkaran keimanan tadi, maka secara filosofis teori Akuntansi Syariah (sebagai salah satu ilmu sosial profetik) memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut (Kuntowidjono 1991; Triyuwono 1995; 2000a; 2000b) :

1. Humanis

Humanis memberikan suatu pengertian bahwa teori Akuntansi Syariah bersifat manusiawi, sesuai dengan fitrah manusia, dan dapat dipraktikkan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk yang selalu berinteraksi dengan orang lain (dan alam) secara dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini berarti teori Akuntansi Syariah tidak bersifat a historis (sesuatu yang asing), tetapi bersifat historis, membumi, dibangun berdasarkan budaya manusia itu sendiri.

2. Emansipatoris

Emansipatoris mempunyai pengertian bahwa teori Akuntansi Syariah mampu melakukan perubahan-perubahan yang signifikan terhadap teori dan praktik akuntansi modern yang eksis saat ini. Perubahan-perubahan yang dimaksud di sini adalah perubahan yang membebaskan (emansipasi). Pembebasan dari ikatan-ikatan semu yang tidak perlu diikuti, pembebasan dari kekuasaan semu (*pseudo power*), dan pembebasan dari ideologi semu. Dengan pembebasan ini diharapkan bahwa teori Akuntansi Syariah mampu melakukan perubahan pemikiran yang sempit dan parsial menuju pemikiran yang luas, holistik, dan tercerahkan.

3. Transendental

Transendental mempunyai makna bahwa teori Akuntansi Syariah melintas batas disiplin ilmu akuntansi itu sendiri. Bahkan melintas batas dunia materi (ekonomi). Dengan prinsip filosofis ini teori Akuntansi Syariah dapat memperkaya dirinya dengan mengadopsi disiplin ilmu lainnya (selain ilmu ekonomi). Aspek transendental ini sebetulnya tidak terbatas pada disiplin ilmu, tetapi juga menyangkut aspek ontologi, yaitu tidak terbatas pada objek yang bersifat materi (ekonomi), tetapi juga aspek non-materi (mental-spiritual). Demikian juga pada aspek epistemologinya, yaitu dengan melakukan kombinasi dari berbagai pendekatan. Sehingga dengan cara semacam ini, teori Akuntansi Syariah benar-benar akan bersifat emansipatoris.

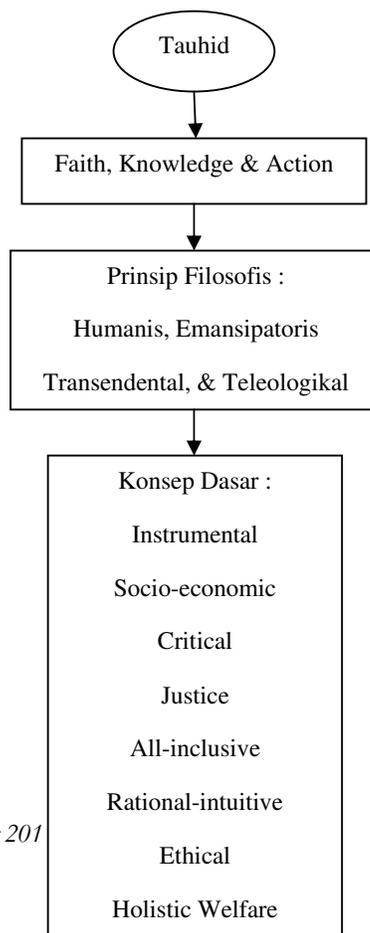
4. Teleologikal

Teleologikal memberikan suatu dasar pemikiran bahwa akuntansi tidak sekedar memberikan informasi untuk pengambilan keputusan ekonomi, tetapi juga memiliki tujuan transendental sebagai bentuk pertanggungjawaban manusia terhadap Tuhannya, kepada sesama manusia, dan kepada alam semesta. Prinsip ini mengantarkan manusia pada tujuan hakikat kehidupan, yaitu falah (kemenangan). Falah di sini dapat diartikan keberhasilan manusia kembali ke Sang Pencipta dengan jiwa yang tenang dan suci (*muthmainnah*).

### Prinsip Filosofis dan Konsep Dasar Teori Akuntansi Syariah

No	Prinsip Filosofis	Konsep Dasar
1	Humanis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Instrumental</i></li> <li>• <i>Socio-economic</i></li> </ul>
2	Emansipatoris	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Critical</i></li> <li>• <i>Justice</i></li> </ul>
3	Transendental	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>All-inclusive</i></li> <li>• <i>Rational-intuitive</i></li> </ul>
4	Teleologikal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Ethical</i></li> <li>• <i>Holistic Welfare</i></li> </ul>

### Struktur Hierarkis Proses Derivasi Konsep Dasar Teori Akuntansi Syariah



*Agency theory* sama sekali tidak obyektif dan netral, tapi sebaliknya ia sarat dengan nilai kapitalistik yang dalam faktanya sangat eksploitatif. *Agency theory* secara samar memiliki kemampuan untuk merasionalkan, menormalisasi, dan melegitimasi berbagai macam instrumen yang digunakan untuk mengendalikan buruh yang seolah-olah kaum buruh memperoleh banyak manfaat dari sistem yang sesungguhnya sangat eksploitatif (Chwastiak, 1999:425).

Lebih lanjut Chwastiak (1999,429) menjelaskan bahwa dengan model tersebut semua tindakan manusia dilakukan dengan cara yang “rasional”. Padahal, dalam kenyataannya, rasionalitas meniadakan instrumen “rasa” dan “intuisi” yang ada dalam diri manusia, serta meniadakan mutual assistance dan *reciprocal respect* yang hidup dalam masyarakat. Rasionalitas, dengan demikian, mengidentitaskan dirinya pada logika kuantitatif dan kalkulatif yang terpisah dari unsur-unsur “irrasional” (atau superrasional). Sikap ini tidak memberikan tempat pada trust dan fairness yang sebetulnya juga merupakan perilaku manusia yang hakiki (Chwastiak, 1999:429, Baiman, 1990:345). Rasionalitas *agency theory* tidak lebih dari rasionalitas utilitarianisme di mana semua kalkulasi berpulang pada utilitas-hedonis yang implikasinya memang dapat memarginalkan sifat-sifat “feminin” manusia (seperti : rasa, intuisi, spiritual, saling membantu, saling menghormati, saling percaya, jujur, dan lain-lainnya).

Secara khusus dapat dikatakan bahwa informasi akuntansi disajikan pada dua pihak, yaitu investor dan kreditor, di mana keduanya merupakan pihak yang memasok “modal” (sebagai “pemilik modal”) pada perusahaan dan mereka mengharapkan adanya *return* yang menguntungkan atas apa yang telah mereka investasikan. Sebagai pemasok modal (atau sebagai prinsipal), investor dan kreditor menghendaki adanya informasi tentang seberapa jauh manajemen (agen) telah mengelola sumber daya tadi dengan baik.

Tujuan dasar laporan keuangan secara implisit merefleksikan kepentingan investor (atau *Stockholders* sebagai prinsipal) atas manfaat ekonomi dari apa yang telah diinvestasikan. Untuk itu, pihak investor membutuhkan informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan (misalnya untuk tetap melakukan investasi atau tidak). Jadi, laporan keuangan merupakan instrumen yang digunakan untuk memberikan informasi tentang kinerja dari manajemen. Dengan informasi tersebut penilaian kinerja manajemen dilakukan oleh prinsipal, dan prinsipal sekaligus dapat mengambil keputusan.

Formula tujuan laporan keuangan sesungguhnya tidaklah benar-benar netral. Formula tersebut memiliki bias nilai, yaitu mementingkan kepentingan pemilik modal, yang pada dasarnya tetap menghegemoni pihak "lain" (*the others*). Yang menjadi kepentingan pemilik modal di sini adalah mempertahankan modal yang ditanam (*capital maintenance*) sekaligus mendapatkan laba yang maksimal. Hal yang krusial di sini adalah bahwa akuntansi menjadi kendaraan yang dikuasai oleh pemilik modal (dalam sistem ekonomi kapitalis) di mana kekuasaan tunggal ekonomi berada pada tangan kapitalis. Akuntansi akhirnya cenderung memperkuat budaya eksploitasi. Dan eksploitasi ini tidak saja dilakukan terhadap pihak-pihak lain dari stakeholders, tetapi juga eksploitasi terhadap alam.

Etika kerja hukum Islam menjelaskan bahwa setiap individu adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya; setiap orang memiliki wewenang dalam pekerjaannya, dan dia bertanggung jawab terhadap wewenang itu dihadapan pemimpin dan Tuhan sebagaimana dijelaskan Nabi Muhammad saw. (Sofyan Syafri Harahap, 1999).

Hubungan agensi dengan demikian tidak dibangun dari akar self-interest, tetapi dengan cinta. Cinta akan tetap memberi kemanfaatan materi, saling berbagi dan kebermaknaan hidup. Mudah-mudahan, bila konsep kekayaan hanya dipandang sebagai bentuk ekonomi semata, maka yang terjadi adalah konflik kepentingan di atas hubungan kooperatif. Tetapi bila konsep kekayaan dipandang sebagai bentuk trilogi, maka ada proses trust yang masuk dalam mekanisme hubungan, trust yang didasari oleh cinta dan saling berbagi. Gagasan ini memang mirip seperti model prinsipal-agent yang lebih teoritis dan perlu diuji secara empiris, daripada mendekati pada model positivist yang lebih empiris tetapi akan mereduksi konsep teoritis yang sebenarnya penting seperti juga ditegaskan oleh Eisenhardt (1989).

Dalam rangka memotivasi para manajer dan pemegang saham agar berperilaku dalam sikap yang memajukan tujuan perusahaan, Burdett dapat memberikan rekomendasi kepada dewan direksi, yaitu :

1. Penilaian terhadap kinerja manajer dibuat dengan kontrak yang jelas sehingga memotivasi agen bekerja dengan kepentingan terbaik prinsipal.
2. Prinsipal memberikan pilihan rencana insentif jangka pendek dan jangka panjang dan agen diberikan keleluasaan dengan batasan yang menguntungkan kepentingan para pemegang saham.

Untuk mencegah kemungkinan terjadinya konflik-konflik tersebut, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan, diantaranya :

1. Penyusunan standar yang jelas mengenai jabatan fungsional maupun struktural ataupun posisi-posisi tertentu yang dianggap strategis dan kritis. Hal ini harus diiringi dengan sosialisasi dan implementasi (*enforcement*) tanpa ada pengecualian-pengecualian yang tidak masuk akal.
2. Diadakan tes kompetensi dan kemampuan untuk mencapai suatu jabatan tertentu dengan adil dan terbuka.
3. Akuntabilitas dan Transparansi setiap "proses bisnis" dalam organisasi.

Akhirnya, akuntansi menjadi alat yang powerful untuk memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya kepada pemilik modal di satu sisi, juga dapat memberikan manfaat injeksi modal dan investasi yang makin besar dan linier kepada agen dari pemilik modal, yaitu manajemen perusahaan dalam mengelola perusahaan.

## E. Penutup

*Agency theory* timbul sebagai akibat adanya dua pihak atau dua individu di dalam organisasi yang bertentangan kepentingan, dimana kedua individu tersebut memiliki tujuan untuk memaksimalkan tingkat kepuasannya masing-masing. Dalam *agency theory* timbul adanya informasi asimetris yang merupakan suatu kondisi di mana beberapa pihak yang terkait dengan transaksi bisnis akan lebih memiliki informasi dibandingkan pihak lainnya. Aplikasi *agency theory* kontrak kerja merupakan suatu filosofi dalam memahami peranan dan kedudukan di antara agen dan prinsipal. Kontrak kerja yang ideal adalah kontrak kerja yang mampu mengoptimalkan utilitas masing-masing pihak dengan tujuan tercapainya pareto yang optimal.

Tingkat *disclosure* yang tinggi mengurangi tingkat informasi asimetris yang pada akhirnya akan mengurangi masalah keagenan, menunjukkan bukti bahwa tidak ada informasi yang disembunyikan oleh perusahaan sehingga laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan transparan. Laporan keuangan yang transparan menyebabkan estimasi investor atas risiko yang ada pada perusahaan rendah, sehingga tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor juga rendah. Lebih banyak pengungkapan informasi yang dilakukan maka jumlah informasi yang dinyatakan oleh suatu perdagangan besar akan berkurang sehingga mengurangi dampak kerugian harga. Akibatnya, investor berkeinginan untuk mengambil posisi yang lebih besar dalam saham perusahaan tertentu dibandingkan saham yang lain. Hal ini akan meningkatkan permintaan terhadap sekuritas perusahaan tersebut dan meningkatkan harga saham perusahaan, sehingga informasi asimetris menurun.

Budaya kerja perusahaan telah mempengaruhi praktek akuntansi dan praktek akuntansi kreatif perusahaan. Dalam tinjauan amanah praktek akuntansi kreatif dalam konteks *agency theory* termasuk dalam kelompok praktek yang bertujuan untuk mementingkan diri sendiri, baik oleh prinsipal maupun agen. Perilaku manajemen dalam praktek akuntansi kreatif ini lebih cenderung menguntungkan direksi sebagai *controlling*, hal ini karena direksi adalah sebagian dari manajemen, dan para manajer telah diangkat dan direkrut oleh direksi. Perilaku ini mengakibatkan para manajer memahami amanah sebagai sifat yang harus loyal pada direksi.

Namun demikian jika dilihat dari hakekat amanah itu datangnya dari Allah, baik manajer maupun direksi telah melakukan tindakan yang tidak sesuai ajaran amanah. Melanggar amanah merupakan tindakan yang menuju kearah berkhianat, dan hal yang demikian ini merupakan perbuatan yang dilarang dan larangan dalam agama adalah "dosa".

Rujukan Islam yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan amanah, jadi simpulan yang ada dalam penelitian ini hanya terbatas pada faktor ini saja. Keterbatasan penelitian ini juga terletak pada pemahaman penulis tentang mengartikan amanah secara detail dari sumber sama, sehingga jika ditemukan sumber lain tentunya akan menghasilkan pendapat yang berbeda.

## Daftar Pustaka

- Ashton, David, 1979, "Agency Theory and Contracts of Employment"
- Bamberg, Günter, and Klaus Spremann, eds, 1987, "Agency Theory, Information, and Incentives", Berlin: Springer-Verlag.
- Bowie, Norman E., and R. Edward Freeman, 1992, *Ethics and Agency Theory: An Introduction*, New York: Oxford University Press.
- Chwastiak, Michele, 1999, "Deconstructing The Prinsipal Agent Model : a View From The Bottom Critical Perspective on Accounting", Vol 10, No 4, h.425-441.
- Eisenhardt, Kathleen M., 1989, "Agency Theory: An Assessment and Review," *Academy of Management Review*, Vol. 14, No. 1, h. 57-74.
- Fama, Eugene, and Michael Jensen, 1983, "Agency Problems and Residual Claims", *Journal of Law and Economics* 26, 327-349.
- Hayne, Leland E, 1988, "Agency Costs, Risk Management, and Capital Structure", *Journal of Finance*, August.
- Harahap, Sofyan, Syafri, 1996, "Akuntansi Islam", Jakarta, Bumi Aksara.
- Jensen, Michael C., dan Meckling, William, H., 1976, "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure," *Journal of Financial Economics* 3, h. 82-137.
- Komalasari, Puput Tri, dan Baridwan, Zaki, (2001), "Asimetri Informasi dan Cost of Capital," *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Vol. 4, No. 1, h.64-81.
- Lang, M. dan Lundholm, R., (1996), "Corporate Disclosure Policy and Analyst Behavior," *The Accounting Review* 71 (October), h. 467-492.
- Myers, Stewart, and Nicholas Majluf, 1984, "Corporate Financing and Investment Decisions When Firms Have Information That Investors Do Not Have", *Journal of Financial Economics* 13, 187-221.
- Nazmuzzaman, Elpi, 2002, "Agency Theory : Masyarakat itu Juragannya Pemerintah", BUJET, November.
- Novi, dkk, 2000, "Agency Theory Vs Stewardship Theory dalam Perspektif Akuntansi", *Media Akuntansi*, Oktober.
- Prima Gusti Hanum Blog's, "Agency Theory", 12 April 2010.
- Shankman, Neil A, 1999, "Reframing the Debate between Agency and Stakeholder Theories of the Firm", *Journal of Business Ethics*.

- Sri Nurhayati, dan Wasilah, 2009, “ *Akuntansi Syari’ah di Indonesia*”, Jakarta, Salemba Empat.
- Triyuwono, Iwan, 1997, “*Akuntansi Syariah dan Koperasi; Mencari bentuk dalam Bingkai Metafora Amanah*”, Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, Volume 1 no 1.
- \_\_\_\_\_, 2000, “*Organisasi dan Akuntansi Syariah*”, Yogyakarta Lkis.
- \_\_\_\_\_, 2006, “*Akuntansi Syari’ab : Perspektif, Metodologi dan Teori*”, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Watts and Zimmerman, 1986, “*Positive Accounting Theory*”, Englewood Cliffs, NJ; Prentice-Hall.
- Widarto, Zaki Baridwan, dan Made Sudarma, 2009, “*Analisa krisis Praktek Akuntansi dalam Konteks Budaya Organisasi PT. BUMI dan Pandangan Islam dalam Menyikapi Praktek tersebut*”, Wacana Vol 12 No 2.